

**PENGABDIAN MASYARAKAT
YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN**

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata



PENULIS :

**DHIAN TYAS UNTARI
ADI WIBOWO NOOR FIKRI
M FADHLI NURSAL
WIDI WINARSO
NENG SITI KOMARIAH**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

DAFTAR ISI

COVER	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. PENDAHULUAN	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III. PENUTUP	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

Wisata menjadi satu kebutuhan bagi setiap manusia. Pelung pengembangan wisata juga semakin besar, hal ini didukung dengan semakin beragamnya jenis produk wisata. Pada pengembangannya kegiatan pariwisata banyak berdampak buruk baik bagi ekologi lingkungan, sosial budaya masyarakat dan bahkan tidak banyak memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Ekowisata berkembang sebagai sebuah konsep pariwisata yang bertanggungjawab untuk memberi kontribusi secara positif terhadap lingkungan, sosial budaya masyarakat dan melalui konsep pemberdayaan masyarakat, konsep ekowisata diharapkan dapat memberi dampak positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tulisan ini merupakan sebuah konseptual paper yang bertujuan memberikan gambaran tentang kegiatan ekowisata dan mengkaitakan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kajian literatur dan data dari instansi terkait. Dengan demikian hasil kajian dapat menjadi sebuah referensi bagi pembangunan secara umum dan pembangunan wisata khususnya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar setelah migas. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai manfaat ganda atau multiplier effect secara ekonomi bagi pemerintah daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Untari, 2012; Siregar, 2004). Di Indonesia sektor wisata merupakan salah satu penyumbang devisa yang signifikan bagi negara.

Table 1. Rangking devisa pariwisata terhadap komoditas ekspor lainnya tahun 2006 – 2012

Rangking	2006	2007	2008	2009	2010
1	Migas	Migas	Migas	Migas	Migas
2	Pakaian jadi	Minyak kelapa sawit	Minyak kelapa sawit	Minyak kelapa sawit	Minyak kelapa sawit
3	Karet olahan	Karet olahan	Karet olahan	Pariwisata	Karet olahan
4	Minyak kelapa sawit	Pakaian jadi	Pariwisata	Pakaian jadi	Pariwisata
5	Alat listrik	Pariwisata	Pakaian jadi	Karet olahan	Pakaian jadi
6	Pariwisata	Alat listrik	Alat listrik	Alat listrik	Alat listrik
7	Tekstil	Tekstil	Tekstil	Tekstil	Tekstil
8	Kayu olahan	Bahan kimia	Kertas dan bahan dari kertas	Kertas dan bahan dari kertas	Kertas dan bahan dari kertas
9	Kertas dan bahan dari kertas	Bahan kimia	Makanan olahan	Makanan olahan	Makanan olahan
10	Bahan kimia	Kayu olahan	Kayu olahan	Kayu olahan	Bahan kimia
11	Makanan olahan	Makanan olahan	Bahan kimia	Bahan kimia	Kayu olahan

Sumber : Dewi (2011)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang cukup baik bagi devisa negara. Bahkan tahun 2009 pariwisata menempati posisi ke tiga

dan mengalami penurunan pada posisi ke empat pada tahun 2010. Secara umum kepariwisataan Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang karena Indonesia memiliki banyak sekali potensi wisata yang dengan pengolahan yang maksimal akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk Negara. Bahkan sektor pariwisata mampu memberikan nilai tambah baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 8,7 persent untuk PDB, bahkan PDB kegiatan wisata dan rekreasi meningkatkan PDB sebesar 15 persen (Franz, 2001 dalam Vanhove, 2005; 1). Penerapan otonomi daerah memberikan konsekwensi logis bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumahtangga sendiri, dan memiliki tanggung jawab penuh dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya melalui kegiatan pembangunan pariwisata.

Permintaan wisata semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permintaan wisata meningkat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi sehingga memudahnya mobilitas dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan terbukanya informasi tentang daerah tujuan wisata, semakin panjang waktu senggang yang tersedia dan dapat digunakan untuk berlibur (Yoeti, 2008; 10 -12), meningkatnya pendapatan masyarakat, kebijakan pemerintah dan aspek psikografis wisatawan (Pitana dan Gayatri, 2005 dalam Murniati, 2008) . Secara umum permintaan pariwisata juga akan meningkat seiring dengan semakin tingginya aktifitas masyarakat yang diiringi dengan semakin tingginya tingkat stress sehingga kegiatan rekreasi dan wisata semakin dibutuhkan. Bahkan WTO meyakini bahwa prospek pariwisata ke depan pun sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (inbound tourism) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020.

Sektor pariwisata dapat menumbuhkan sektor – sektor lain dan ini merupakan salah satu dampak dari kegiatan wisata di suatu wilayah. Pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada pengembangan sektor – sektor yang lain. Pembangunan pariwisata selama ini dirasa kurang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan hanya menguntungkan nelayan bermodal besar ataupun pengusaha – pengusaha bermodal besar sehingga semakin menciptakan GAP antara masyarakat lokal dengan pengusaha wisata. Sehingga terjadilah ketidak merataan manfaat yang didapat oleh kedua belah pihak.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi (Satria, 2009)

Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya.

Tulisan ini merupakan sebuah konseptual paper yang bertujuan memberikan gambaran tentang kegiatan ekowisata dan mengkaitakan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kajian literatur dan data dari instansi terkait. Dengan demikian hasil kajian dapat menjadi sebuah referensi bagi pembangunan secara umum dan pembangunan wisata khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wisata dan Ekowisata

Wisata mengandung arti bepergian bersama untuk bersenang-senang. Dalam Webster's Dictionary, 1996 dalam Avenzora; 2008 dinyatakan bahwa "*Tourism is a trip of excursion usually ending at the point of beginning*". Kurt Morgenroth dalam Warpani (2007) mengungkapkan bahwa dalam arti sempit wisata adalah lalu lintas orang – orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata – mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup, budaya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saat kita berbicara tentang wisata maka ada perpindahan manusia dari tempat tinggalnya ke tempat lain untuk sementara. Terjadinya perpindahan manusia tersebut karena adanya perbedaan, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan iklim, perbedaan budaya, perbedaan geografis dan lain lain.

Perkembangan sektor wisata saat ini, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu luang, kemudahan akses informasi, dan semakin baiknya akses transportasi serta semakin berkembangnya pendidikan yang didukung dengan pengetahuan yang baik tentang teknologi membuat oprator maupun pengelola wisata dapat memberikan layanan wisata yang baik. Bahkan saat ini wisata merupakan sebuah kebutuhan mengingat aktivitas masyarakat yang semakin padat, sedangkan mobilitas semakin terbatas Paradox peningkatan aktifitas yang berbanding terbalik dengan keterbatasan mobilitas menyebabkan tingkat stress masyarakat. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk berwisata semakin meningkat.

Perkembangan sektor wisata yang mengarahkan pada *mass tourism* dimana kegiatan wisatanya berorientasi kepada kuantiti atau jumlah kunjungan menyebabkan

dampak yang negative. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan wisata yang melebihi daya tampung, konversi lahan menjadi area perhotelan, polusi yang disebabkan oleh limbah buangan dari kegiatan wisata merupakan beberapa dampak negative kegiatan *mass tourism* terhadap lingkungan. Selain itu kegiatan *mass tourism* juga dapat mengikis kebudayaan lokal. Lebih parahnya lagi perkembangan wisata secara umum mengundang investor – investor asing untuk mengembangkan usaha. Efeknya orang asing yang mendapatkan buah manis dari hasil peningkatan sektor wisata tersebut. Masyarakat sekitar hanya menjadi penonton tanpa mendapatkan mafaat yang signifikan dari pengembangan wisata di daerahnya.

Keprihatinan ini yang menyebabkan bergesernya kegiatan *mass tourism* kearah *ecotourism* atau ekowisata. *The Ecotourism Association of Australia* mendefinisikan ekowisata sebagai kegiatan wisata yang secara ekologis berkelanjutan dan mendorong perkembangan pemahaman, penghargaan dan tindakan konservasi.

Menurut Form (2004) dalam Damanik dan Weber (2006: 38) ekowisata merupakan perjalanan outdoor dikawasan alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta memberikan perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal. Sejalan dengan pengetian diatas The Internasional Ecotourism Society dalam Nugroho (2011; 11) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata ke wilayah – wilayah alami dalam rangka mengkonservasi dan menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan terhadap penduduk lokal.

Banyak yang beranggapan bahwa ekowisata adalah wisata yang dilakukan di alam terbuka, sehingga saat berbicara tentang muatan konservasi dalam kegiatan ekowisata maka yang terbersit adalah bagaimana mengkonservasi flora dan fauna. Itu bukan suatu hal yang salah, hanya saja ekowisata memiliki muatan yang lebih luas lagi. Ekowisata merupakan gabungan dari dua kata yaitu ekologi dan wisata. *Ekologi* merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan dimana didalamnya terdapat interaksi manusia dengan alam, manusia dengan manusia lain ataupun dengan kelompok lain. Lingkungan yang membentuk sebuah

budaya pada masyarakat. Sehingga budaya dengan hasil – hasil kebudayaan baik yang tangible maupun yang intangible merupakan sesuatu yang perlu di konservasi.

Kegiatan ekowisata berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat baik sebagai konsumen atau wisatawan maupun masyarakat lokal. Dengan demikian muatan edukasi sangat lekat dengan kegiatan ekowisata, sehingga peran interpretasi yang baik yang dapat menggambarkan objek wisata dengan baik dan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai serta melindungi lingkungannya maupun bentuk – bentuk budayanya. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang diberikan oleh The Office of National Tourism Australia dalam Avenzora (2008; 10), bahwa ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang didalamnya mengandung interpretasi terhadap lingkungan alam dan budaya serta pengelolaan sumber daya alamnya secara ekologis bersifat lestari.

Terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal untuk pembangunan tetapi dengan tetap mempertimbangkan nilai - nilai keserasian dan seimbang dalam pemanfaatannya. Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial.

Dalam pelaksanaannya, dikenal lima prinsip ekowisata yaitu:

1. Nature based; produk dan program berdasarkan kondisi alami.
2. Ecologically sustainable; manajemen dan pelaksanaan berkelanjutan.
3. Environmentally educative; pendidikan lingkungan bagi pengelola, masyarakat lokal dan pengunjung.
4. Local community based; bermanfaat bagi masyarakat lokal.
5. Ecotourist based; kepuasan bagi pengunjung.

2.2 Pengembangan Ekowisata

Suprana (1997) diacu dalam Qomariah (2009) menyebutkan dalam pengembangan wisata memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), antara lain:

1. Strategi pengembangan ODTW

Pengembangan potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan, pembangunan, kelembagaan, sarana dan prasarana dan infrastruktur, pengusaha pariwisata, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan sosial ekonomi, penelitian pengembangan dan pendanaan.

2. Program pengembangan ODTW Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan: (a) Inventarisasi potensi, pengembangan dan pemetaan ODTW, (b) Evaluasi dan penyempurnaan.

Pengembangan Ekowisata di Indonesia, menurut Usman (1999) perlu mengikutsertakan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan wisata yang melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi objek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2003) dalam Untari (2009) menjelaskan dalam upaya pengembangan ekowisata akan berjalan dengan baik diperlukan perencanaan dan kebijaksanaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata. Secara konseptual ekowisata menekankan tiga prinsip dasar pengembangan, yaitu:

1. Prinsip konservasi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi dan atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam.

2. Prinsip partisipasi masyarakat adalah pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan
3. Prinsip ekonomi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang
4. Prinsip edukasi yaitu pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Prinsip wisata adalah pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung serta memastikan usaha ekowisata berkelanjutan.

2.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian:

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti member kekuasaan.

Dalam Suharto (2010) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- (a) Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan.
- (b) Menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife (1995) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuatan dan kelompok lemah. Kekuatan disini diartikan bukan hanya menyangkut politik melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- (a) Pilihan – pilihan personal dan kesempatan – kesempatan hidup.
- (b) Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
- (c) Ide dan gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
- (d) Lembaga – Lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata – pranata masyarakat serta lembaga kesejahteraan social, pendidikan dan kesehatan.
- (e) Sumber – sumber, merupakan kemampuan memobilisasi sumber – sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- (f) Aktifitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa.
- (g) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisai.

Menurut Prijono dalam Fauzi (2012) , pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan, pengalihan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan memberdayakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan dan keberdayaan

Sedangkan menurut Gaspersz dalam Fauzi (2012), memberdayakan masyarakat berarti memungkinkan masyarakat untuk mencapai kemampuan prestasi tinggi. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

2.4 Dampak Pengembangan Pariwisata

Kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak, dikarenakan para pengunjung melakukan suatu perjalanan yang meninggalkan tempat asal mereka menuju sebuah tempat tertentu dan menghabiskan uang dan waktu serta dilaksanakan dengan bersenang-senang. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak bagi lokasi dimana wisatawan tersebut berkunjung.

Suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Mereka datang ke daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu, menggunakan sumber daya dan fasilitasnya, dan biasanya mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan, tidak dapat dibantah bahwa hal itu akan berdampak pada kehidupan ekonomi destinasi tersebut. Dampak ekonomi yang ditimbulkan, secara langsung maupun tidak langsung serta dapat bersifat positif maupun negatif. Cohen (1984, dalam Pitana, 2009) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan *control*, dampak terhadap

pembangunan pada umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya sebagai berikut pendapatan dari penukaran valuta asing, penyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah, penyerapan tenaga kerja, *multiplier effects*, pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat local. (Leiper, 1990 dalam Pitana, 2010)

Di samping dampak positif bagi perekonomian di atas, Pitana mengutip WTO (1980: 9-12) mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut, meningkatnya permintaan akan produk pertanian local, memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif, menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah atau Negara, meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut, mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru, menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktifitas ekonomi, penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah, manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber *revenue* bagi otoritas lokal

Di samping dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang telah diuraikan di atas, juga tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan pariwisata bagi ekonomi suatu daerah atau negara. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperluka dalam pariwisata sehingga tidak terserapnya produk local, sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat sehingga pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat (Mathieson dan Wall, 1982 dalam Leiper, 1990: 233).

Pendapatan sektor pariwisata seringkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti

misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya. WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan. Dalam kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar

Selain itu WTO (1980) dalam Untari (2013) menambahkan dampak negatif pariwisata lainnya bagi ekonomi suatu daerah atau negara selain diantaranya sebagai berikut, kelangkaan akan sumber bahan makanan, ketidakcocokan produk lokal dengan permintaan pasar pariwisata, kelangkaan sumber energi dan bertambahnya biaya pengolahan limbah.

2.5 Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penciptaan konsep pariwisata berbasis masyarakat.

Kepariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu menerapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial dan dinamika budaya.
3. Penciptaan keselarasan, sinergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan, budaya, dan lain-lain.
4. Pemanfaatan sumber daya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan kelestariannya yang pengelolaannya secara *eco-efficiency* (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga mencapai *eco-effectivity* (*redistribute, reactual*).

5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Pemberdayaan masyarakat pariwisata merupakan konsep yang mudah sulit dalam pengaplikaisannya, karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistik dan continue untuk digali dan memberdayakan segala kalangan umur mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kaum manula (masyarakat lanjut usia) harus ikut dilibatkan dan dipahami.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri uni serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut:

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional
2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.

3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down.

BAB III

PENUTUP

Wisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan baik bagi pemerintah melalui pendapatan dari sektor pajak dan retribusinya, bagi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, serapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraannya. Kegiatan wisata dapat meningkatkan produktifitas sektor – sektor yang lain.

Pariwisata disatu sisi masih menjadi salah satu sektor unggulan dibebarapa daerah di tapi di sisi lain konsep moderenisasi dan industrialisasi yang tidak berpihak pada masyarakat lokal, sebagai konsekuensinya adalah ketidak merataan pendapatan dan manfaat secara ekonomi. Dengan prinsip – prinsip pengembangan ekowisata yang berpihak kepada *local community* maka pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kegiatan ekowisata merupakan jawabannya dimana masyarakat lokal akan mendapatkan banyak nilai lebih dari peningkatan permintaan wisata tersebut.

Dengan hasil kajian diatas, diharapkan menjadi sebuah acuan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang kepariwisataa,. Pembentukan sarana – sarana untuk mendukung keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dan pengembnagan pariwisata menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah karena apapun bentuk sebuah pembangunan harus tetap mengedepankan dampak yang didapat bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah pembangunan pariwisata. Dengan demikian diharapkan keberpihakan pemerintah lebih diutamakan pada usaha bagaimana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan – bantuan dari pemerintah dapat diberikan dalam mendukung keikut sertaan masyarakat dalam pembanguna dan pembangunan pariwisata, baik dalam permodalan, pendampingan, pelatihan maupun pemasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Avenzora, Ricky, 2008, *Ekoturisme Teori dan Praktek*, BRR NAD dan Nias. Banda Aceh.
- Damanik Janianton dan Weber Helmut F, 2006, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*, Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM dan Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Dewi, Ike Juwita, 2011, *Implementasi dan Implikasi Kelembagaan Pemasaana Pariwisata yang Bertanggungjawab (Responsible Tourism Marketing)*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Fauzi, Hamdani, 2012, *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, Cetakan ke-1, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Gunn, Clare A, 1994, *Tourism Planning, Basic, Concepts, Case*, Third Edition, Taylor & Francis, Washington.
- Ife, Jim, 1995, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Logman. Australia
- Leiper, Neil, 1990, *Tourism Systems: An Interdisciplinary Perspective*, Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, Palmerston North, New Zealand.
- Nasikun, 2000, *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds.)*, Pengusahaan Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Iwan, 2011, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pitana, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta.
- Pitana, Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit ANDI, Yokjakarta.
- Qomariah L, 2009, *Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan)*, Skripsi, IPB, Bogor.
- Satria, Dias, *STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI LOKAL DALAM RANGKA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI WILAYAH KABUPATEN MALANG*, Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 37-47

- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Cetakan ke-4, Refika Aditama, Bandung.
- Siregar, Muhammad Arifin, 2004, *Pengembangan Pariwisata Dalam Kontribusinya Untuk Penanggulangan Kemiskinan*, Warta Pariwisata, ISSN; 1410-7112, Vol. 7, No.4.
- Usman M, 1999, *Peluang Pengembangan Ekoturisme Indonesia Sebagai andalan Alternatif Kepariwisata Nasional*, Makalah Pada Seminar Prospek dan Manajemen Ekoturisme Memasuki Milenium Ketiga. Bogor: Departemen Kehutanan
- Untari. Dhian Tyas, 2013, *Peningkatan Sektor Pertanian Melalui Kegiatan Wisata*, Prosiding Lokakarya dan Seminar Nasional FKPTPI, Bogor.
- , Dhian Tyas, et al, 2013, *Strategi Pemasaran Sebagai Usaha Mengembangkan Ekowisata Reginal (Studi Kasus pada objek wisata Goa Pindul)*, Prosiding Seminar Nasional FMI5, Pontianak.
- Untari, Rini, 2009, Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di zona wisata Bogor Kabupaten Bogor, Tesis, IPB, Bogor.
- Warpani, Suwardjoko, 2007, *Pariwisata dalam tata ruang wilayah*. ITB, Bandung
- Yoeti, Oka A, 2008, *Ekonomi Pariwisata; Introduksi, Informasi dan Implementasi*, Kompas Media Indonesia, Jakarta.
- Vanhove, Norbert, 2005, *The Economics of Tourism Destinations*, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.